

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara melakukan pembangunan ekonomi dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sehingga diharapkan dapat menaikkan standar kehidupan yang lebih baik, terbukanya lapangan pekerjaan baru, dan mewujudkan keseimbangan penghasilan di seluruh wilayah. Dengan adanya jumlah lapangan pekerjaan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai indikator pencapaian kinerja pembangunan ekonomi di suatu negara(Rusalia, 2018).

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam dan manusia yang melimpah, akan tetapi dengan adanya potensi yang dimiliki Indonesia belum mencapai pembangunan yang merata. Hal ini ditunjukkan dari tingkat kemiskinan yang tinggi dan masalah pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya kesempatan kerja di berbagai wilayah(Amani, 2018). Akibat hal tersebut maka masalah pengangguran muncul karena banyaknya jumlah pencari kerja dan sedikitnya pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu dalam mengatasi masalah tersebut maka tugas dari seluruh sektor ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru agar terserapnya angkatan kerja yang tersedia.

Adapun upaya dalam mengoptimalkan kesempatan kerja yakni dengan pengembangan sektor ekonomi salah satunya yaitu di bidang pertanian, dengan adanya pengembangan tersebut maka diharapkan dapat memperbaiki struktur ekonomi yang tidak merata. Pertanian menjadi sektor utama dalam proses pembangunan ekonomi secara nasional, hal ini

disebabkan karena sektor pertanian memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, memberikan kontribusi yang signifikan pada pendapatan nasional dan ekspor, serta sebagian besar masyarakat pedesaan bergantung pada sektor ini untuk mata pencaharian mereka(Usman, 2019).

Tujuan adanya pengembangan pada sektor pertanian adalah untuk mensejahterakan petani. Kesejahteraan petani sendiri di indikasikan oleh nilai tukar petani (NTP). Terjadinya peningkatan nilai tukar petani, menandakan naiknya kesejahteraan petani yang mengacu pada semangat petani untuk berproduksi, dan secara tidak langsung memberikan dampak pada naiknya keinginan masyarakat untuk melakukan bertani, sehingga apabila nilai tukar petani meningkat maka hal ini juga akan mempengaruhi lapangan pekerjaan yang baru pada sektor pertanian(Halim et al., 2015).

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, lahan pertanian kini banyak beralih fungsi, sehingga akan memberikan dampak pada penyempitan lahan pertanian. Adanya konversi lahan pertanian yang banyak terjadi memberikan pengaruh yang dapat merugikan pada pertumbuhan sektor pertanian karena dapat menurunkan kapasitas produksi, penyerapan angkatan kerja, produksi pangan, serta pendapatan per kapita petani. Adanya alih fungsi lahan pertanian juga dapat melemahkan daya saing produk pertanian dalam negeri. Dengan begitu maka untuk mencukupi kebutuhan masyarakat desa serta penguatan ketahanan dan ketersediaan pangan nasional sangat bergantung pada lahan pertanian yang digunakan dalam usaha tani(Suratha, 2014). Dalam mengatasi hal tersebut setidaknya ada beberapa opsi yang bisa dilakukan

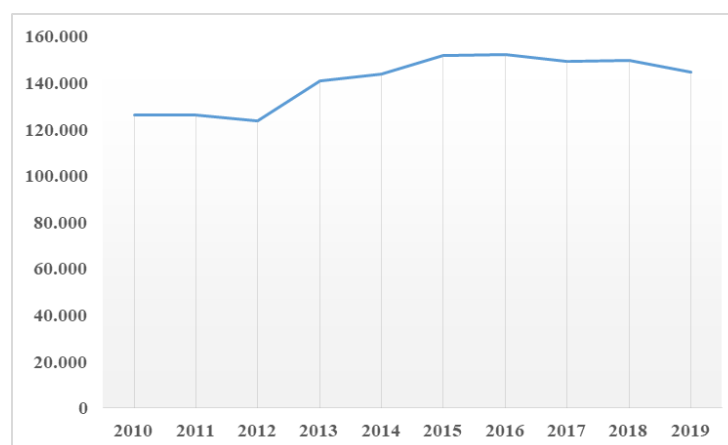
yakni menyediakan lahan pertanian baru atau berpindahnya tenaga kerja ke sektor non pertanian.

Adanya permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian diatas mengakibatkan kebutuhan hidup petani mengalami ketidakseimbangan karena semakin rendahnya pendapatan maka peminat pekerja dalam bertani juga akan menurun. Kondisi ini juga akan mempengaruhi angkatan kerja produktif contohnya seperti kaum muda yang akan memilih bekerja di bidang non pertanian, sehingga tenaga kerja potensial di sektor pertanian akan terus berkurang (Setiawan, 2006). Meskipun demikian pemerintah juga mengupayakan program dan kebijakan agar bisa mengatasi permasalahan diatas, karena dilihat dari kontribusi sektor pertanian pada perekonomian Indonesia juga semakin baik. Terbukti selama periode 2013-2018 nilai tambah kumulatif dari PDB sektor pertanian mencapai 1.375 triliun dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 47 persen (Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 2018). Menurut Suhariyanto, struktur lapangan pekerjaan penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 masih dipimpin oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yakni pertanian sebesar 27,33%, perdagangan 18,81%, dan industri pengolahan 14,96%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian juga terserap dengan baik (Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2019).

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 175.221 Ha atau $\pm 3.67\%$ dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, dimana penggunaan lahan

di Kabupaten Lamongan didominasi oleh lahan sektor pertanian. Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 mencapai 1.373.390 jiwa dan mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah Kabupaten Lamongan sangat cocok untuk dijadikan pertanian(BPS Kab. Lamongan, 2019).

Gambar 1.1. Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan (Ha)

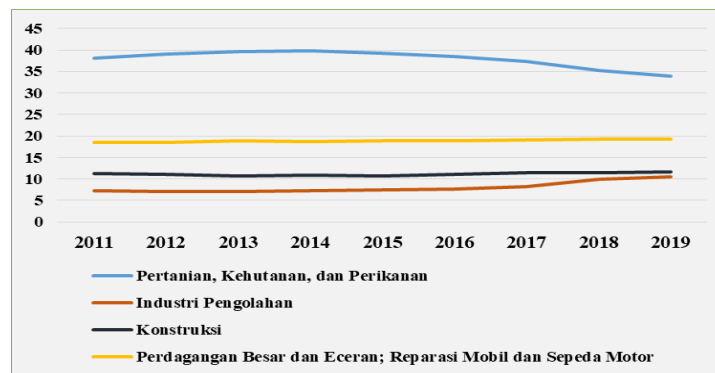


Sumber : Bps Kabuten Lamongan

Luas lahan pertanian merupakan tanda efisien atau tidak efisiennya usaha pertanian yang dilakukan. Karena luas lahan juga memberikan pengaruh terhadap biaya dan produksi yang didapat oleh petani ketika masa panen. Luas lahan yang semakin sempit akan menciptakan hasil produksi yang sedikit, hal ini dikarenakan luas lahan pertanian sangat erat kaitannya dengan efisiensi usaha tani(Sayifullah & Emmalian, 2018). Dengan begitu maka luas dan kondisi lahan pertanian di Kabupaten Lamongan sangat penting untuk diperhatikan. Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa luas lahan pertanian sendiri di Kabupaten Lamongan memiliki perkembangan yang fluktuatif dalam beberapa tahun, pada tahun 2013 luas lahan pertanian mengalami peningkatan sebesar 140.722 ha, dan di tahun 2016 mengalami

peningkatan paling besar dalam 10 tahun terakhir yakni sebesar 151.987 ha, namun di tahun 2019 mengalami kembali penurunan sebesar 144.363 ha. Jika dilihat dari luas wilayah Kabupaten Lamongan sendiri mencapai 175.221 ha, kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas lahan di Kabupaten Lamongan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. (BPS Kab. Lamongan, 2021).

Gambar 1.2. Distribusi Presentase PDRB 4 Sektor Terbesar di Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam persen)



Sumber : Bps Kabuten Lamongan

Dilihat dari grafik diatas, peran sektor pertanian bagi perekonomian di Kabupaten Lamongan mempunyai kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya yang dimana dari tahun 2011-2019 masih mendominasi sebesar 35% ke atas, hal ini berimplikasi pada penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dari tahun 2016 sampai 2019 cenderung mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,86% pada tahun 2016, tetapi turun menjadi 5,43% di tahun 2019. Terbukti pada sektor pertanian yang memasuki kuadran III yang di mana meskipun pertumbuhannya kurang baik, sektor pertanian memberikan kontribusi yang tinggi. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi lokal, sektor

pertanian masih perlu dikembangkan lebih lanjut(BPS Kab. Lamongan, 2021).

Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan didominasi oleh tenaga kerja sektor pertanian, hal ini dibuktikan data dari BPS Kabupaten Lamongan bahwa pertanian memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak namun melihat perkembangan dari beberapa tahun mengalami fluktuatif.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Lamongan (dalam ribuan/jiwa)

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian	287.766	296.856	287.745	260.899	287.362	282.272	241.603
Industri	42.110	37.479	44.000	38.577	66.201	75.992	72.771
Konstruksi	22.658	29.320	19.421	33.520	31.411	41.371	38.980
Perdagangan	119.140	130.359	135.660	134.401	122.338	107.550	125.731
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	11.820	11.080	12.730	16.538	18.051	19.263	13.620
Keuangan	5.410	8.479	6.789	8.260	9.105	9.130	15.774
Jasa Kemasyarakatan/Perorangan dan Lainnya	55.731	78.528	106.100	93.110	71.164	62.997	103.550

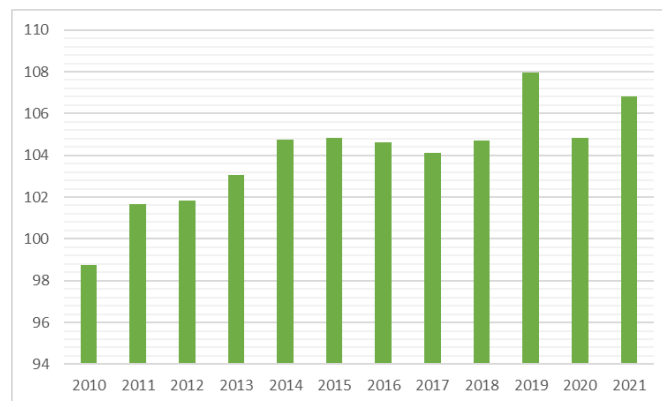
Sumber : Bps Kabupaten Lamongan

Menurut tabel di atas bahwa tiga besar struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Lamongan terdiri dari sektor pertanian, perdagangan, dan jasa kemasyarakatan/perorangan dan lainnya. Jika dilihat dari tahun 2011-2012, sektor pertanian menyerap lebih dari separuh tenaga kerja di Kabupaten Lamongan, kondisi ini mulai mengalami pergeseran selama periode 2013-2017. Hal ini terbukti dengan jumlah tenaga kerja sektor pertanian di tahun 2012 mencapai 296.856 orang, namun di tahun 2017 mengalami penurunan hingga mencapai 241.603. Dengan demikian penyerapan tenaga kerja sektor pertanian terus menurun jika diperbandingkan dengan sektor perdagangan dan sektor jasa lainnya, akan tetapi sektor ini masih menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja di

Kabupaten Lamongan. Penurunan tenaga kerja tersebut disebabkan karena dari tahun ke tahun terdapat beberapa perpindahan tenaga kerja pertanian ke nonpertanian yang di pengaruhi oleh beberapa faktor(BPS Kab. Lamongan, 2020).

Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian, Kabupaten Lamongan secara konsisten mendorong kemajuan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan kemandirian petani(BPS Kab. Lamongan, 2019). Kesejahteraan petani dapat dilihat dari seberapa besar nilai tukar petani (NTP). Kabupaten Lamongan memiliki nilai tukar petani yang berfluktuatif hal ini terbukti dari grafik dibawah, dimana rata-rata nilai tukar petani di Kabupaten lamongan memiliki nilai diatas 100 yang berarti kesejahteraan petani di Kabupaten Lamongan lebih baik.

Gambar 1.3. Nilai Tukar Petani Kabupaten Lamongan (dalam persen)



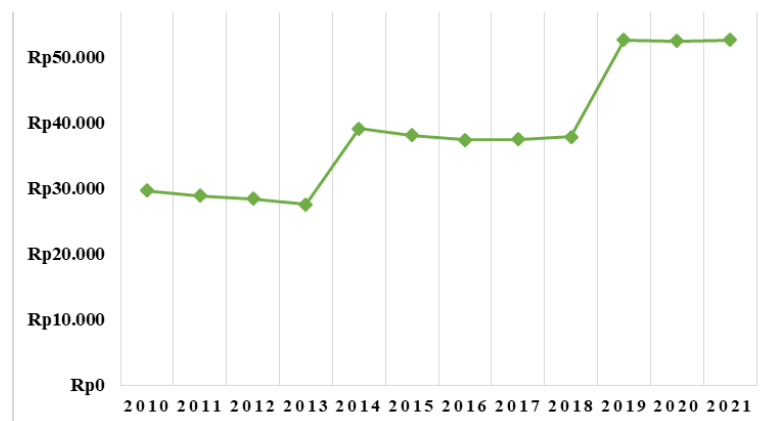
Sumber : Bps Kabupaten Lamongan

Berdasarkan grafik diatas nilai tukar petani selama periode 2010-2021 mengalami pertumbuhan secara fluktuatif, nilai tertinggi didapatkan pada tahun 2019 sebesar 107,975. Nilai tukar petani mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terganggu dari pertumbuhan harga barang yang

dijual petani (It) dan barang-jasa yang dikonsumsi petani (Ib), yang berarti petani di Kabupaten Lamongan mengalami surplus, di mana harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar nilai tukar petani, maka semakin besar pula keinginan untuk terlibat dalam usaha pertanian, dan semakin besar pula penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Lamongan.

Adanya nilai tukar petani tidak sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan petani yang lebih baik, karena NTP bukanlah satu-satunya indikator untuk melihat kesejahteraan petani. Hal ini diungkapkan oleh (Yacoub & Mutiaradina, 2020) bahwasannya upah riil buruh tani juga dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani dan dapat menggambarkan sebagai daya beli petani itu sendiri.

Gambar 1.4. Upah Riil Buruh Tani (dalam rupiah)



Sumber : Bps Kabuten Lamongan

Grafik di atas memperlihatkan bahwa upah riil buruh tani mengalami kenaikan dari tahun 2010-2021. Tahun 2019 upah riil memiliki tingkat paling tinggi jika dibandingkan dengan tahun yang lain yakni sebesar Rp52.565 per hari. Peningkatan upah riil buruh tani ini sebagai

sesuatu yang positif karena semakin tinggi upah riil buruh tani yang diterima maka semakin tinggi pula daya beli buruh tani. Dengan melihat pertumbuhan upah riil yang diterima petani hal ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lamongan, karena menurut (BPS Kab. Lamongan, 2020) sektor pertanian mempunyai tingkat upah yang paling rendah jika dibandingkan dengan sektor perekonomian yang lain. Karena beberapa petani memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dengan demikian maka juga mempengaruhi pada rendahnya upah riil yang diterima oleh buruh tani, sehingga hal ini juga akan berdampak pada kesejahteraan petani (Belmondo & Triani, 2020).

Peningkatan produktivitas di berbagai sektor ekonomi akan meningkatkan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang bekerja dalam suatu sektor tersebut (Usman, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan kesempatan kerja sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan sehingga perlu dilakukan untuk menyerap tenaga kerja dalam kegiatan sektor ekonomi daerah.

Dengan melihat segala kondisi sektor perekonomian di Kabupaten Lamongan maka yang perlu di perhatikan kembali adalah sektor pertanian, karena sektor ini memiliki kontribusi tinggi dalam perekonomian regional, akan tetapi dalam pertumbuhan sektor pertanian dikatakan cukup rendah dibandingkan sektor lain. Maka dari itu pemerintah melakukan Kebijakan RT dan RW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dimana hal ini pemerintah mendukung penguatan sistem agropolitik untuk meningkatkan

pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dalam menetapkan Provinsi Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang salah satunya adalah Kabupaten Lamongan (Ridlo & Susilowati, 2018).

Kabupaten Lamongan telah dipilih sebagai wilayah Pengembangan Kawasan Agropolitan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan pengembangan wilayah Kabupaten Lamongan dapat lebih berkonsentrasi pada sektor pertanian untuk mendorong pertumbuhan dan pemanfaatan ekonomi serta mendorong sektor-sektor unggulan di wilayah tersebut khususnya sektor pertanian. Maka sangat penting untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perlambatan, pertumbuhan, dan penyerapan tenaga kerja dalam sektor pertanian, dengan begitu dapat mencegah perlambatan ataupun penurunan di masa mendatang. Sehingga arah pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Lamongan dapat terarah berdasarkan sektor unggulan yang ada. Maka ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor pertanian akan terserap dengan baik. Melihat latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian di Kabupaten Lamongan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan di teliti meliputi :

- 1) Apakah PDRB sektor pertanian berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Lamongan?

- 2) Apakah luas lahan pertanian berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Lamongan?
- 3) Apakah upah riil buruh tani berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Lamongan?
- 4) Apakah nilai tukar petani berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Lamongan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini meliputi :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh PDRB sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Lamongan
- 2) Untuk mengetahui pengaruh luas lahan pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Lamongan
- 3) Untuk mengetahui pengaruh upah riil buruh tani terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Lamongan
- 4) Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar petani terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Lamongan.

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan data jumlah tenaga kerja sektor pertanian, PDRB sektor pertanian atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, luas lahan pertanian di Kabupaten Lamongan, upah riil buruh tani, dan nilai tukar petani dengan periode waktu 15 tahun yakni dari tahun 2007-2021. Adapun variabel yang

digunakan yakni penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebagai variabel terikat, dan PDRB sektor pertanian, luas lahan pertanian, upah riil buruh tani, dan nilai tukar petani sebagai variabel bebas.

1.5. Manfaat Penelitian

Berikut ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini :

1.5.1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk sumbang pemikiran bagi bidang ilmu ekonomi
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lain, menambah pembendaharaan bacaan, dan memperluas pemahaman mengenai penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Kabupaten Lamongan
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pembuat kebijakan pembangunan tentang bagaimana mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

1.5.2. Secara Praktis

Pemerintah dapat menggunakan peneliti ini sebagai panduan dalam membuat kebijakan dan mencari solusi untuk masalah ketenagakerjaan.